



P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Muqoddimah:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora



Paradiplomasi Bengkulu dalam Pengembangan Potensi Kopi Bengkulu

Nandy Rizki Putradiansyah¹⁾, Windy Dermawan²⁾, RMT Nurhasan Affandi³⁾

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia¹⁾

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia²⁾

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia³⁾

nandy20001@mail.unpad.ac.id¹⁾

windy.dermawan@unpad.ac.id²⁾

rmthiunpad@gmail.com³⁾

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis praktik paradiplomasi Bengkulu dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu. Hal-hal yang dielaborasi dalam tulisan ini mengenai upaya paradiplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu beserta kendala-kendala dan peluang dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu. Melalui paradiplomasi, pengembangan potensi kopi Bengkulu dimungkinkan untuk terbuka secara lebih luas, tidak hanya pengembangan pada lingkup domestik, tetapi juga lingkup luar negeri. Komoditas kopi Provinsi Bengkulu merupakan aset daerah yang potensial bagi pengembangan potensi daerah. Tulisan ini menggunakan konsep paradiplomasi sebagai alat analisis untuk mengeksplorasi praktik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu di dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu ke luar negeri. Metode riset yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Riset ini menemukan bahwa upaya paradiplomasi Bengkulu dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu menemui sejumlah kendala diantaranya kendala dalam aspek sumber daya manusia, minimnya dukungan regulasi dan tata kelola bagi pengembangan potensi kopi Bengkulu, infrastruktur dalam distribusi produk kopi Bengkulu, dan birokrasi yang cenderung prosedural sehingga menghambat pengembangan produk kopi Bengkulu.

Kata Kunci: Kopi Bengkulu; Paradiplomasi; Petani Kopi; Potensi Daerah

Abstract

The purpose of this article is to analyze Bengkulu's paradiplomacy practices in developing Bengkulu's coffee potential. The matters elaborated in this article are regarding the paradiplomacy efforts that have been carried out by the Bengkulu Provincial government along with the obstacles and opportunities in developing the potential of Bengkulu coffee. Through paradiplomacy, it is possible to develop the potential of Bengkulu coffee more widely, not only within the domestic scope, but also abroad. Bengkulu Province's coffee commodity is a potential regional asset for developing regional potential. This article uses the concept of paradiplomacy as an analytical tool to explore the practices carried out by the Bengkulu Provincial government in developing the potential of Bengkulu coffee abroad. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews with a number of relevant informants, field observations, documentation studies and literature studies. This research found that Bengkulu's paradiplomacy efforts in developing the potential of Bengkulu coffee encountered a number of obstacles, including obstacles in the aspect of human resources, minimal regulatory and governance support for developing the potential of Bengkulu coffee, infrastructure in the distribution of Bengkulu coffee products, and bureaucracy that tends to be procedural, thus hampering development. Bengkulu coffee products.

Keywords: Bengkulu Coffee; Coffee Farmers; Paradiplomacy; Regional Potential

PENDAHULUAN

Paradiplomasi menjadi salah satu isu yang belakangan ini mengalami eskalasi dalam studi Hubungan Internasional, utamanya didorong oleh makin maraknya aktor sub-negara yang ikut meramaikan kontestasi hubungan internasional di dunia. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh daerah-daerah tertentu yang tidak dapat secara maksimal memanfaatkan paradiplomasi sebagai sarana untuk memajukan daerahnya, seperti yang dialami oleh Provinsi Bengkulu. Walau memiliki banyak nilai berupa potensi pariwisata, pertambangan, dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelaksanaan paradiplomasi, Bengkulu baik di level provinsi hingga kabupaten belum mampu melaksanakan paradiplomasi secara maksimal akibat terkendala oleh berbagai permasalahan.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia. Beberapa kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu memiliki topografi yang sangat sesuai untuk dijadikan lahan perkebunan kopi, seperti yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Perbedaan topografi yang ada juga menyebabkan munculnya beragam jenis kopi yang memiliki karakteristiknya tersendiri, berbeda-beda di setiap wilayah penanamannya. Perbedaan karakteristik ini menjadi daya jual tersendiri bagi setiap jenis kopi yang ada serta menysar ke berbagai golongan pengonsumsi kopi.

Pada skala internasional, diperlukan upaya diplomasi dalam rangka memperkenalkan produk kopi Bengkulu. Diplomasi yang menggunakan kopi sebagai alat diplomasi telah dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Diplomasi kopi merupakan bagian dari diplomasi budaya dan *gastrodiplomasi* yang dilakukan oleh negara dalam rangka memperkenalkan keragaman yang mereka miliki melalui kekayaan budaya, termasuk makanan dan minuman. Selain itu, diplomasi kopi juga dianggap sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dimana pada praktiknya diplomasi kopi bertujuan untuk meningkatkan angka ekspor kopi suatu negara. Dari berbagai konsep diatas, dapat dinilai bahwasannya diplomasi kopi merupakan gabungan dari diplomasi budaya dan diplomasi ekonomi, dimana baik dalam teori maupun praktiknya diplomasi kopi menggunakan kedua konsep tersebut.

Komoditas kopi yang memiliki potensi besar juga berkaitan erat dengan upaya diplomasi ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana diplomasi ekonomi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam menyukseskan rencana ini adalah dengan meminta setiap golongan masyarakat untuk turut memasarkan produk dalam negeri terhadap pasar luar, termasuk kopi-kopi yang berasal dari Indonesia. Diperlukan penguatan kerja sama dan kemampuan dalam membaca peluang untuk dapat memaksimalkan peran diplomasi ekonomi dan diplomasi kopi untuk memajukan pihak-pihak yang berkepentingan pada bidang komoditas kopi di tanah air (Sabaruddin, 2017).

Pelaksanaan diplomasi kopi juga mengundang partisipasi aktor-aktor selain negara. Aktor non-negara yang dimaksud dapat berupa perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, bahkan individu. Keikutsertaan aktor non-negara tersebar melalui berbagai upaya, mulai dari penjualan produk kopi, pengadaan seminar, hingga mengundang pihak dari negara lain untuk secara langsung ikut menyaksikan proses pengolahan produk kopi di Indonesia. Termasuk di Provinsi Bengkulu, pegiat kopi yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka memperkenalkan produk kopi yang mereka miliki. Terbaru, produsen kopi dari Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, Kopi Bermani, berhasil meraih juara dalam gelaran pesta rakyat di Turki. Selain itu, telah dibuka pula beberapa gerai Bencoolen Coffee House di Malaysia sebagai bentuk promosi dan penjualan komoditas kopi asli Bengkulu di pasar Internasional (Bengkuluprov.go.id, 2022).

Akan tetapi, tingginya potensi kopi di daerah Provinsi Bengkulu tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan terutama upaya promosi yang maksimal oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk pula aktor non-negara sesungguhnya juga memiliki tanggung jawab untuk turut memperkenalkan potensi kopi yang dimiliki daerahnya, sehingga tidak sepenuhnya harus bergantung pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Terbukanya pintu untuk menjajaki pasar internasional tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh aktor-aktor di daerah, terutama pemerintah selaku pembuat kebijakan, menjadikan potensi kopi yang dimiliki di daerah terkait tidak sepenuhnya dapat diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan dalam model-model diplomasi yang memunculkan istilah paradiplomasi atau diplomasi daerah juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk dijadikan dasar dalam mempromosikan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, termasuk di dalamnya untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. Momentum pelaksanaan diplomasi kopi juga seharusnya dapat dikaitkan dengan proses paradiplomasi yang dilakukan oleh daerah sehingga terdapat keselarasan antara diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara, sub-negara, dan aktor sosial lainnya.

Kemunculan konsep paradiplomasi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh aktor-aktor yang berada di Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dan atau pengetahuan aktor-aktor tersebut terhadap konsep paradiplomasi itu sendiri, sehingga pelaksanaannya masih sulit untuk dilakukan. Terutama dari sektor pemerintah, belum terdapat langkah yang konsisten dalam penggunaan konsep paradiplomasi untuk mengenalkan potensi yang dimiliki. Hal ini menjadi permasalahan apabila pemerintah dan aktor-aktor lainnya tidak segera sadar bahwa paradiplomasi merupakan peluang yang sangat besar untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, aktor-aktor sosial dan pemerintah di Provinsi Bengkulu secara tidak sadar telah melakukan paradiplomasi ditandai dengan berbagai aktivitas yang mereka lakukan dalam rangka memperkenalkan potensi yang dimiliki di level mancanegara. Artikel ini mencoba menjelaskan dinamika-dinamika yang terjadi dalam berbagai upaya promosi potensi kopi Bengkulu terhadap pihak luar negeri melalui konsep paradiplomasi.

Terdapat penelitian terdahulu yang dirujuk dalam artikel ini untuk tujuan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam artikel terkait. Penelitian-penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Wolff (2007), Jackson (2018), dan Paquin (2020). Penelitian-penelitian ini membahas definisi, sejarah, dan bentuk-bentuk Paradiplomasi. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas mengenai pelaksanaan diplomasi oleh beberapa aktor dalam hubungan internasional. Paradiplomasi merupakan suatu konsep baru yang muncul dalam ranah studi Hubungan Internasional. Konsep paradiplomasi diperkenalkan untuk menjelaskan mengenai aktivitas entitas sub-negara dalam melaksanakan hubungan dengan entitas di luar negaranya. Terjadi penambahan aktor dalam konsep paradiplomasi, dimana aktor sub-negara seperti pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat yang membawa nama daerah dapat melaksanakan aktivitas hubungan internasional layaknya aktor-aktor lain yang sudah terlebih dahulu muncul. Paradiplomasi menjelaskan bahwa entitas sub-negara memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya secara mandiri serta berhak untuk berpartisipasi di ruang lingkup internasional dalam rangka mencapai kepentingan yang mereka miliki (Wolff, 2007).

Istilah paradiplomasi mulai dikenal sejak era 1980an, ditandai dengan adanya aktivitas internasional antara provinsi-provinsi yang ada di Kanada dengan negara bagian di Amerika Serikat. Kedua entitas sub-negara ini menjalin hubungan lintas negara dalam konteks globalisasi serta peningkatan hubungan perbatasan antar negara (Paquin, 2020). Penambahan awalan "para" pada kata dasar diplomasi merupakan suatu usaha untuk menggambarkan adanya paralelitas antara aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor sub-negara. Bentuk paralelitas aktivitas ini menurut Duchacek (1990) dalam Jackson (2018) dapat berupa keselarasan, penyempurnaan, bahkan konflik dengan aktivitas diplomasi yang dilaksanakan oleh negara tempat entitas sub-negara itu berada (Jackson, 2018).

Paradiplomasi muncul sebagai alternatif dari cara penyelesaian hal-hal kecil yang tidak semestinya diselesaikan oleh negara, sehingga aktor-aktor sub-negara muncul dan dapat dengan sendirinya menyelesaikan masalah kecil yang mereka miliki. Kemampuan aktor sub-negara untuk melaksanakan aktivitas paradiplomasi merupakan salah satu bentuk implementasi dari hak otonomi yang mereka miliki, sehingga memberikan kebebasan tersendiri bagi aktor sub-negara yang lebih tau dan memahami kondisinya untuk mencari solusi yang paling sesuai atas kebutuhan mereka (Alam & Sudirman, 2020).

Terdapat setidaknya tiga lapis bentuk paradiplomasi yang dapat dijalankan oleh entitas sub-negara yaitu pada isu ekonomi, koordinasi, dan politik. Menurut Tavares, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi turut sertanya aktor daerah dalam pelaksanaan paradiplomasi. Pertama, aktor tersebut berusaha untuk mencari peluang global dalam rangka mengembangkan daerahnya sendiri. Peluang yang dimaksud berupa pemanfaatan globalisasi sebagai momen yang mempermudah pergerakan arus barang dan jasa sehingga dapat berimplikasi baik bagi sektor-sektor daerah, terutama di sektor ekonomi dan teknologi. Kedua, paradiplomasi menjadi celah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui pengembangan fasilitas pelayanan publik dengan bekerja sama terhadap pihak lain. Ketiga, paradiplomasi memberikan ruang bagi aktor daerah untuk memiliki representasi di luar wilayah negaranya, sehingga dapat memudahkan proses pengelolaan diaspora yang berada diluar negeri. Hal ini nantinya dapat berkaitan dengan peningkatan kualitas daerah karena telah memiliki akses langsung terhadap dunia luar. Selain ketiga alasan diatas, mayoritas alasan dilaksanakannya paradiplomasi adalah untuk mencapai kepentingan politik serta sebagai proses adaptasi terhadap berbagai kondisi yang dimiliki oleh daerah terkait.

Aturan mengenai pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam beberapa aturan Undang-Undang dan aturan kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijelaskan dan diatur secara lebih rinci dalam bentuk Undang-Undang



serta aturan kementerian. Undang-Undang yang mengatur berjalannya paradiplomasi oleh aktor-aktor daerah di Indonesia adalah: 1) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 2) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; dan 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali giat Paradiplomasi para aktor di Bengkulu dalam ikhtiar mengembangkan potensi kopi ke luar negeri. Riset inipun bertujuan untuk turut berkontribusi bagi studi-studi Paradiplomasi umumnya dan atau khususnya di Indonesia mengenai Kopi Bengkulu serta pengembangan potensinya ke pasar luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoretis kepada studi Hubungan Internasional dalam kajian mengenai diplomasi, khususnya diplomasi sub-nasional atau paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah studi mengenai diplomasi kopi Indonesia yang selama ini belum terlalu banyak diteliti.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap sejumlah narasumber yang relevan, studi literatur atas berbagai sumber yang tersebar di internet, terutama yang berasal dari laman-laman berita dan pemerintahan dan studi dokumentasi terhadap sejumlah dokumen penting yang terkait dengan riset ini. Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses transkrip hingga mendapatkan benang merah atas berbagai pendapat dan informasi yang ada. Data kemudian dianalisis untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor di Bengkulu. Sebagai upaya menjaga validitas data, maka periset membandingkan data yang didapatkan dengan data yang berasal dari sumber lain. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari bias terhadap suatu data serta menjamin bahwa data yang didapatkan tidak jauh berseberangan dengan data yang telah ada di sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN

Aktivitas Paradiplomasi Bengkulu dalam Pengembangan Potensi Kopi Bengkulu

Kekayaan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, terutama dalam komoditas kopi menjadi salah satu komoditas andalan yang proses promosinya diusahakan secara terus-menerus oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung terhadap komoditas terkait. Pihak-pihak dominan dalam proses promosi potensi kopi Bengkulu baik kedalam maupun keluar negeri terdiri dari setidaknya dua aktor utama, yaitu pemerintah daerah dan pengusaha kopi. Secara aktif kedua aktor ini memiliki kapasitas yang paling mumpuni untuk melaksanakan promosi atas potensi yang dimiliki melalui berbagai cara di dalam maupun luar negeri.

Terkhusus di Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempromosikan potensi kopi yang dimiliki oleh daerah. Pertama, terdapat upaya promosi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada tahun 2017 yaitu dengan memperkenalkan potensi kopi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu kepada diplomat-diplomat yang datang ke Bengkulu. Pertemuan ini memberikan peluang bagi pemerintah Provinsi Bengkulu beserta aktor-aktor di daerah untuk memiliki jejaring internasional yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama kopi sebagai salah satu komoditas utama yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Kedua, terdapat upaya pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pihak dari Kemenlu RI yang bermaksud untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, diwakili oleh mantan Wakil Bupati Lebong pada tahun 2019, yang menemui Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI dengan membawa salah satu komoditas potensi daerah berupa kopi Lebong, Bengkulu. Sama halnya dengan pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur pada 2017, pertemuan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Lebong ini memang tidak memberikan hasil secara langsung bagi daerah terutama terhadap kemajuan potensi kopi Bengkulu. Akan tetapi, pertemuan ini merupakan langkah awal dalam proses paradiplomasi potensi kopi Bengkulu yang nantinya diharapkan dapat dipraktikkan langsung oleh diplomat-diplomat berwenang terhadap publik di negara lain.

Pada tahun 2019, Provinsi Bengkulu mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Kopi Internasional 2020 bertajuk "*Towards the Vision of Indonesia as a World*

Coffee Paradise: From Farmers to Costumers". Kesempatan ini merupakan pintu sekaligus katalis besar dalam upaya paradiplomasi potensi kopi Bengkulu. Selama satu tahun sejak diberikannya kabar mengenai kegiatan ini, serangkaian persiapan telah dilakukan dalam rangka menyongsong kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut. Pemerintah secara aktif melaksanakan persiapan teknis terkait pelaksanaan kegiatan berskala internasional tersebut, terutama dalam penyiapan lokasi acara yang ditargetkan akan dilaksanakan di Benteng Marlborough, salah satu benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia. Akan tetapi, rencana pelaksanaan peringatan Hari Kopi Internasional secara langsung di Provinsi Bengkulu ini harus dibatalkan dan berubah menjadi pelaksanaan secara daring pada 1-4 Oktober 2020. Hal ini terjadi karena momentum peringatan Hari Kopi Internasional tersebut harus terbentur dengan berbagai aturan prioritas mengenai penanganan pandemi COVID-19. Padahal, serangkaian rencana besar telah diatur oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan peringatan terkait, seperti rencana pemecahan rekor MURI kegiatan minum kopi terbanyak serta rencana mengundang duta besar negara-negara penghasil kopi di dunia untuk datang secara langsung melihat kondisi potensi yang dimiliki oleh Bengkulu (Carminanda, 2020). Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Tavares (2016), pilihan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tetap melaksanakan peringatan ICD secara daring daripada membatalkan secara total kegiatan tersebut juga berkaitan dengan terbukanya pandangan pemerintah mengenai besarnya peluang yang muncul sebagai akibat dari adanya globalisasi. Mudah-mudahan perpindahan arus barang dan informasi yang ditawarkan oleh globalisasi di bidang teknologi berhasil dilirik oleh pemerintah Bengkulu yang menyadari bahwa pemanfaatan teknologi sebagai salah satu alat dalam melaksanakan paradiplomasi merupakan suatu langkah yang sangat tepat. Hal ini terbukti dengan terjangkaunya berbagai belahan dunia lain berupa peserta-peserta dari berbagai negara akibat dari pemanfaatan teknologi terkait.

Pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu juga berkali-kali menjadi fasilitator dalam menyambut kedatangan tamu dari luar negeri yang berminat untuk meninjau secara langsung potensi kopi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. Melalui penelitian yang dilakukan secara langsung oleh periset di lapangan dan melalui sumber-sumber yang tersedia di internet, terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memfasilitasi tamu yang datang serta pelaku usaha kopi di daerah yang meminta bantuan untuk dapat memperkenalkan potensi kopi yang dimilikinya terhadap dunia luar.

Terbaru Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai penghasil kopi terbesar di Provinsi Bengkulu menerima kedatangan tamu dari Malaysia yang bertujuan untuk mencari peluang investasi komoditas-komoditas yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong ini. Keempat tamu disambut oleh Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi, beserta jajaran OPD yang membidangi komoditas-komoditas utama di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, bupati beserta jajaran memaparkan segenap komoditas unggulan yang dimiliki oleh kabupaten, yaitu komoditas yang berasal dari sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Berkaitan dengan riset ini, pertemuan tersebut juga menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mempromosikan komoditas kopi yang dimiliki, dalam hal ini adalah kopi yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong. Bupati sebagai representasi daerah dalam menyambut kedatangan tamu yang berasal dari luar negeri menyampaikan kesiapannya untuk memenuhi serangkaian permintaan yang diinginkan oleh pihak investor jikalau potensi kerja sama ini dapat berlanjut (Bisri, 2023).

Mengenai paralelitas antara aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, sehingga mampu tercipta paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu dapat dilihat dari adanya kesinambungan terkait upaya-upaya promosi potensi daerah terkait. Paralelitas yang paling mendasar antara aktivitas pemerintah pusat dan daerah dalam upaya promosi potensi kopi Bengkulu tercermin pada aktivitas diplomasi kopi, dimana komoditas kopi digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi sekaligus diharapkan dapat memberikan keuntungan atas pengembangan komoditas terkait.

Selain itu, paralelitas juga terlihat dari aktivitas domestik secara vertikal antara pemerintah di tingkat pusat dan aktor-aktor di daerah serta aktivitas domestik secara horizontal antara aktor-aktor yang sama-sama berada di daerah. Secara vertikal, dapat terlihat peran yang dilakukan oleh kementerian dalam mendukung upaya paradiplomasi pengembangan potensi kopi Bengkulu seperti yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perindustrian yang turut hadir dalam pembukaan ICD 2020 secara virtual. Kementerian perdagangan juga memberikan dukungan dalam penyediaan tenaga ahli dalam rangka meningkatkan kualitas kopi yang berasal dari Bengkulu serta berperan dalam keikutsertaan produk-produk kopi Bengkulu dalam pameran berskala internasional. Keikutsertaan ini juga didukung oleh pihak BUMN yang melibatkan produk kopi Bengkulu untuk menjadi peserta dalam pameran-pameran terkait, seperti yang telah dijelaskan pada kasus ikutnya Bermani Coffee di acara Festival Pasar Senggol Turki 2022. Pada hal pengembangan potensi kopi domestik, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang berperan dalam berbagai upaya peningkatan kualitas perkebunan hingga pengolahan kopi yang berasal dari Provinsi Bengkulu, dibuktikan

dengan adanya komitmen Kementerian Pertanian untuk terus membantu petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (Christiyaningsih, 2022).

Aktivitas lain dalam pelaksanaan paradiplomasi untuk pengembangan potensi kopi Bengkulu juga dapat dilihat melalui aktivitas yang dilaksanakan oleh aktor-aktor non-pemerintah. Bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh aktor non-pemerintah tersebar dari aktivitas yang dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan aktor lain, termasuk pemerintah. Terdapat aktivitas paradiplomasi yang dilakukan bersama antara pihak pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan pihak non-pemerintah dalam upaya mempromosikan potensi kopi Bengkulu. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu yang menggandeng pihak Bencoolen Coffee dalam membuka lima gerai kedai kopi di Malaysia. Peresmian secara simbolis atas dibukanya kelima gerai kedai kopi di Malaysia ini dilakukan selama tahun 2022, dimana salah satu prosesi peresmian kedai kopi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai representasi pemerintah daerah dan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono (Kristianti, 2022).

Tak hanya aktivitas yang telah dilakukan diatas, Bencoolen Coffee selaku perusahaan swasta yang bergerak pada bidang produksi, distribusi, hingga konsumsi kopi baik di dalam maupun di luar negeri juga telah melakukan aktivitas luar negeri lain, seperti yang dilakukan pada tahun 2021. Setelah berhasil meraih penghargaan dari APVA pada tahun 2019, Bencoolen Coffee bersama Gubernur Bengkulu mengadakan acara *ngopi* bareng secara daring dalam rangka mempromosikan potensi kopi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, salah satunya adalah promosi terhadap Kazakhstan. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 2021, Bencoolen Coffee mempromosikan produknya secara daring ke publik Kazakhstan sebagai langkah awal menjajaki peluang pasar di kawasan Asia Tengah. Rencana besar Bencoolen Coffee untuk merambah pasar Asia Tengah melalui Kazakhstan disambut baik oleh pihak KBRI Nur-Sultan, karena rencana ini berjalan beriringan dengan keinginan Kazakhstan untuk meningkatkan impor biji kopi dari Indonesia (Hidayat & Haris, 2021).

Melalui penelitian yang dilakukan di Bermani Coffee, perusahaan kopi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, didapati temuan bahwa pengusaha kopi yang berada di tingkat kabupaten belum memiliki aktivitas luar negeri yang cukup signifikan. Disampaikan oleh Haris, pemilik Bermani Coffee, dirinya serta perusahaan yang ia pimpin belum memiliki serangkaian rencana jangka panjang dalam melaksanakan paradiplomasi potensi yang mereka miliki. Sejauh ini, Bermani Coffee hanya melakukan aktivitas luar negeri berupa partisipasi di berbagai acara bertaraf internasional serta memenangkan berbagai kompetisi di tingkat internasional pula.

Terbaru, Bermani Coffee berpartisipasi di acara Festival Pasar Senggol Turki 2022 yang diadakan di Turki pada 1-6 Juni 2022. Kehadiran Bermani Coffee pada acara ini merupakan hasil dari kerja sama harmonis antara aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam melaksanakan paradiplomasi dari tingkat kabupaten hingga pusat. Bermani Coffee berhasil hadir atas kerja sama antara pihak perusahaan dan Rumah BUMN PLN Kepahiang, binaan PT PLN (Persero) UIW S2JB hingga dilirik oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID), Kementerian BUMN, dan Konsulat Jenderal Istanbul. Festival yang dikemas dengan konsep pasar tradisional Indonesia ini diharapkan mampu menjadi pintu masuk produk-produk Bermani Coffee sebagai salah satu bentuk potensi kopi Bengkulu terhadap pasar Eropa. Momentum ini juga dapat menjadi bukti keseriusan aktor non-pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi kopi Bengkulu melalui aktivitas paradiplomasi.

Berkaitan dengan aturan yang dimiliki oleh Indonesia, aktivitas promosi potensi kopi Bengkulu yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun aktor non-pemerintah dari Provinsi Bengkulu merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang telah dijalankan oleh aktor daerah. Hal ini berkaitan dengan isi Ayat (1) Pasal 367 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwasannya promosi potensi daerah merupakan salah satu bentuk kerja sama dengan pihak luar negeri. Selain itu, pelaksanaan paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berasal dari Provinsi Bengkulu juga berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri sehingga tidak menyalahi aturan apapun.

Tata Kelola Paradiplomasi di Bengkulu

Pelaksanaan aktivitas paradiplomasi Bengkulu memerlukan dukungan dari faktor tata kelola sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas terkait. Aturan-aturan terkait tersebar di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing tentunya memiliki aturan yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Secara aturan dan birokrasi yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong, merujuk pada Peraturan Bupati Rejang Lebong/Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 13 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong serta Peraturan Bupati Rejang Lebong Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 1 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat aturan resmi mengenai penyelenggaraan kerja sama luar negeri antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri. Urusan kerja sama yang tertulis di dalam Perbup terkait merupakan kerja sama dalam negeri yang berada di bawah tanggung jawab Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Aturan yang terdapat pada tingkat kabupaten ini berbeda dengan aturan yang terdapat pada tingkat Provinsi Bengkulu. Pada aturan tingkat Provinsi Bengkulu, yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai urusan luar negeri pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap pihak luar negeri, terutama dalam bidang kerja sama.

Dari kedua aturan diatas, terdapat perbedaan signifikan antara aturan di tingkat kabupaten berupa Perbup dan peraturan di tingkat provinsi berupa Pergub mengenai pelaksanaan aktivitas luar negeri pemerintah daerah. Dapat dilihat bahwasannya aturan yang terdapat dalam Perbup tergolong domestik dan tidak secara spesifik mengatur dan membicarakan mengenai potensi kerja sama luar negeri yang merupakan bagian dari paradiplomasi daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang terdapat di dalam Pergub, dimana disampaikan secara jelas bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu secara spesifik memiliki serangkaian alur birokrasi yang perlu dijalankan dalam rangka pelaksanaan aktivitas luar negeri yang tentunya berkaitan dengan agenda paradiplomasi daerah nantinya.

Akan tetapi, aturan-aturan dan birokrasi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu masih belum terlalu komprehensif mengatur mengenai hubungan luar negeri daerah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Seperti halnya jika dibandingkan dengan Pasal 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara khusus telah memiliki Sub Bagian yang membidangi urusan luar negeri pemerintah daerah terkait, yaitu Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang berada di bawah Bagian Kerja Sama dalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, di bawah tanggung jawab Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kendala dalam Paradiplomasi Potensi Kopi Bengkulu

Paradiplomasi sebagai suatu konsep yang dapat dibidang baru memang belum sepenuhnya dipahami oleh aktor yang harusnya dapat memanfaatkan konsep tersebut. Aktor-aktor yang berada di daerah sebagai aktor yang seharusnya dapat memaksimalkan peran paradiplomasi tidak memahami sepenuhnya mengenai betapa besarnya keuntungan yang ditawarkan oleh aktivitas paradiplomasi yang dapat mereka lakukan. Seperti halnya yang menjadi topik utama riset ini, aktor-aktor yang berada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Bengkulu, masih belum sepenuhnya dapat memanfaatkan momentum berkembangnya diplomasi aktor sub-negara yang tengah naik daun saat ini. Entitas-entitas yang seharusnya memiliki visi besar dalam pengembangan potensi daerah melalui aktivitas paradiplomasi tidak memiliki pemahaman yang spesifik mengenai paradiplomasi. Terlebih, pemahaman mengenai diplomasi yang dimiliki oleh para aktor di daerah dapat dinilai masih terlalu "klasik" dimana pelaksanaan diplomasi masih dianggap berkutat pada aktivitas-aktivitas *high politics* yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan aktor-aktor yang berada di daerah.

Melalui riset yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, didapati fakta bahwa ASN di tingkat dinas tidak memiliki pemahaman mengenai paradiplomasi, ditandai dengan pengakuan bahwa mereka masih asing ketika mendengar istilah paradiplomasi. Kurangnya pemahaman mengenai konsep paradiplomasi berimplikasi pada sulitnya pencarian data mengenai paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu, karena narasumber yang seharusnya menjadi narasumber kunci mengenai paradiplomasi pengembangan potensi kopi Bengkulu tidak dapat secara jelas mengelompokkan mana kegiatan yang bersifat internasional dan domestik.

Selain itu, kendala terletak pada masih besarnya kekuasaan yang dipegang oleh para tengkulak, sehingga memengaruhi kondisi internal proses pengelolaan kopi Bengkulu. Para tengkulak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki strategi untuk selalu membeli hasil produksi kopi dari para petani secara instan, sehingga para petani yang enggan ambil pusing mengenai biaya transportasi dan distribusi akan mudah tergiur dengan tawaran dari para tengkulak terkait. Hal ini menjadi permasalahan ketika tengkulak yang berasal dari keempat kota besar yang telah disebutkan sebelumnya membeli kopi yang berasal dari Bengkulu, karena "identitas" kopi yang berasal dari Bengkulu tersebut akan hilang dan berubah

menjadi kopi yang berasal dari keempat kota terkait.

Salah satu faktor lain yang menjadi faktor kurangnya aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor di Provinsi Bengkulu adalah adanya berbagai perbedaan fokus dan tujuan yang terjadi antar aktor hingga menimbulkan serangkaian dinamika yang terbilang cukup merugikan bagi semua aktor yang terlibat. Masih minimnya kesadaran aktor terhadap peluang pasar yang lebih besar di luar negeri menjadi salah satu alasan utama tidak berkembangnya aktivitas paradiplomasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Stagnansi pelaksanaan aktivitas Paradiplomasi juga diakibatkan oleh kurangnya keseriusan dan keinginan aktor untuk memperkenalkan daerahnya. Aktor-aktor yang berada di daerah relatif lebih mengutamakan kenyamanan dan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menutup diri dari besarnya peluang-peluang yang terbuka di masa saat ini.

Terdapat pula alasan mengenai kapasitas masing-masing aktor dalam melaksanakan aktivitas paradiplomasi. Kapasitas dalam konteks pengetahuan mengenai praktik paradiplomasi, kemampuan membuat kebijakan, dan yang paling utama adalah kemampuan berbahasa asing juga memiliki peran besar dalam minimnya aktivitas paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu. Kurang maksimalnya kapasitas yang dimiliki oleh SDM di Provinsi Bengkulu membatasi ruang gerak aktor terkait.

Kesulitan dalam negeri yang menjadi penghambat upaya paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu adalah terbatasnya infrastruktur serta panjangnya alur produksi hingga distribusi yang harus dilalui oleh para petani. Jauhnya akses yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu terhadap pelabuhan dan pusat-pusat niaga di Indonesia merupakan penghalang utama yang menjadikan potensi yang dimiliki tidak dapat dimaksimalkan seperti layaknya potensi yang dimiliki oleh provinsi dengan keadaan infrastruktur yang lebih memadai.

Faktor luar yang memengaruhi terhambatnya upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh para aktor non-pemerintah di Bengkulu adalah sulitnya memenuhi berbagai kriteria dan standar impor yang dimiliki oleh negara lain. Kesulitan ini muncul bukan hanya karena tingginya standar yang dimiliki oleh negara-negara tujuan ekspor, melainkan juga disebabkan oleh kurangnya keinginan dan keseriusan para produsen kopi di daerah untuk mencapai standar tersebut. Berkaitan dengan apa yang dijelaskan diatas, celah inilah yang dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk serta merta mengambil kesempatan di tengah-tengah ketidakseriusan para aktor daerah, sehingga pada akhirnya identitas kopi daerah Bengkulu menghilang.

Berdasar pada perspektif aktor non-pemerintah, terdapat keluhan yang disampaikan berupa panjangnya alur birokrasi yang harus diikuti jika aktor-aktor ini ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya keinginan aktor non-pemerintah untuk bekerja sama dengan aktor pemerintah dalam rangka pengembangan potensi kopi Bengkulu. Panjangnya alur birokrasi meliputi tahap pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan dan evaluasi kerja sama yang dijalani sehingga seringkali memperlambat gerak aktor non-pemerintah untuk mengejar target yang diinginkan.

Hasil dan Peluang atas Aktivitas Paradiplomasi Potensi Kopi Bengkulu

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan dijelaskan diatas, belum terdapat hasil yang maksimal atas pelaksanaan paradiplomasi potensi kopi Bengkulu. Terbatasnya aktivitas paradiplomasi yang dilakukan serta banyaknya kendala yang muncul pada pelaksanaan paradiplomasi potensi kopi Bengkulu menjadikan hasil yang didapat tidak secara signifikan terasa bagi Provinsi Bengkulu pada umumnya dan para aktor di bidang kopi pada khususnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu melalui aktivitas-aktivitas seperti pertemuan hanya memberikan hasil berupa terciptanya jejaring terhadap pihak luar serta peningkatan pamor Kopi Bengkulu terhadap segelintir masyarakat.

Dari segi ekspor komoditas kopi, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu malah menunjukkan penurunan angka ekspor kopi dari Bengkulu pada tahun 2021 ke 2022. Data menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor komoditas kopi dari Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 hanya sebesar 0,20 Ton dan bernilai hanya sekitar \$900, jauh dibawah volume dan nilai ekspor di tahun 2021 yang mencapai 36,60 Ton dan bernilai hingga \$58.300. Hal ini menjadi suatu anomali mengingat besaran ekspor komoditas kopi dari Provinsi Bengkulu malah menurun dan berbanding terbalik dengan banyaknya upaya paradiplomasi yang dilakukan pada kurun waktu terkait (Diantoro, 2023).

Hasil yang didapat dari upaya paradiplomasi dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu dirasa dapat lebih maksimal jika kendala yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diatasi. Faktor utama yang menjadi alasan kurang maksimalnya hasil dari paradiplomasi potensi kopi Bengkulu ini adalah kurang baiknya akses dan panjangnya alur birokrasi, sehingga kedua hal ini harusnya dapat menjadi fokus utama para aktor agar hasil pelaksanaan paradiplomasi potensi kopi Bengkulu dapat lebih maksimal.

Kejelian para aktor di daerah dalam melihat berbagai peluang yang ada juga harus lebih

ditingkatkan agar hasil yang didapat dalam pengembangan potensi kopi Bengkulu tidak hanya sebatas peningkatan pamor kopi Bengkulu, tetapi juga memberikan dampak yang dapat secara langsung dan signifikan terasa oleh aktor-aktor di daerah, terutama para masyarakat petani kopi di Provinsi Bengkulu. Jika tidak terdapat perubahan pada aspek domestik dan pada internal setiap aktor, tentunya mimpi-mimpi atas pelaksanaan paradiplomasi potensi kopi Bengkulu dengan tujuan menginternasionalisasi potensi daerah tidak akan tercapai dan hanya menjadi angan-angan belaka bahkan hanya menjadi “modal” kampanye bagi figur-figur tertentu, seperti yang telah terjadi selama ini.

Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mukti, dimana terdapat istilah *ceremonial paradiplomacy* yang berupa banyaknya seremonial mengenai pelaksanaan paradiplomasi namun kurang pada aspek penerapan dan realisasi program terkait. Selain itu, Tavares dalam Mukti juga menyatakan bahwa kesempatan yang didapat oleh pemimpin daerah untuk menjalin hubungan dengan pihak luar negeri merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk mendorong popularitas figur tersebut, terutama di kalangan masyarakat yang awas terhadap isu global. Bukti sosial bertaraf internasional yang dimiliki oleh seseorang, walaupun hanya berupa foto, merupakan nilai jual yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mengejar ambisi figur terkait dan telah terbukti pada apa yang dilakukan oleh beberapa Gubernur dan Wali Kota di kawasan Amerika Latin.

Momentum globalisasi dan digitalisasi merupakan peluang besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para aktor di daerah dalam upaya pengembangan potensi kopi Bengkulu. Aktor pemerintah dapat memanfaatkan momentum globalisasi dan digitalisasi dengan menyediakan serangkaian kemudahan dalam aspek birokrasi, pencatatan data, sosialisasi, dan promosi potensi kopi Bengkulu. Pemerintah dapat menyediakan layanan berbasis digital bagi para pengusaha dan petani kopi sehingga pelaksanaan upaya pengembangan dan paradiplomasi potensi kopi Bengkulu dapat lebih efektif, efisien, dan transparan.

Selain itu, aktor non-pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum globalisasi dan digitalisasi dengan meningkatkan kanal promosi, kemudahan mendapat dan menyebarkan informasi mengenai potensi kopi daerah, serta menjalin komunikasi terhadap pihak yang berasal dari seluruh belahan dunia. Pengusaha kopi dapat memanfaatkan berbagai macam *e-commerce* sebagai sarana penjualan produk yang mereka miliki serta dapat memanfaatkan berbagai sosial media sebagai tempat untuk mempromosikan diri mereka. Petani kopi dapat memanfaatkan internet untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk kopi yang mereka produksi agar lebih maksimal, serta dapat mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses budidaya hingga penjualan kopi.

SIMPULAN DAN SARAN

Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor di Provinsi Bengkulu, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah, telah terdapat upaya paradiplomasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan potensi kopi Bengkulu. Pemerintah melaksanakan aktivitas paradiplomasi dengan menggandeng pihak-pihak dalam dan luar negeri, memberikan dukungan secara domestik, dan pembentukan serangkaian aturan. Aktor non-pemerintah melakukan upaya paradiplomasi dengan mengikuti berbagai kompetisi dan pameran serta menjalin kerja sama terhadap pihak dari luar negeri. Aktor non-pemerintah juga turut memperbaiki iklim pengelolaan kopi di daerah dengan melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan di berbagai sektor mulai dari budidaya hingga produksi kopi.

Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala dalam upaya paradiplomasi potensi kopi Bengkulu, seperti kendala SDM, infrastruktur, regulasi dan birokrasi. Kendala-kendala ini harus segera diatasi agar pelaksanaan paradiplomasi dapat berjalan lebih maksimal dan peluang dalam pelaksanaan paradiplomasi khususnya momentum globalisasi dan digitalisasi, bisa segera tereksplorasi. Belum terdapat hasil yang maksimal bagi Provinsi Bengkulu, khususnya bagi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan paradiplomasi. Hasil yang diperoleh hanya berupa peningkatan popularitas kopi Bengkulu di mata penikmat kopi serta terbentuknya koneksi terhadap berbagai pihak. Aktor-aktor di daerah harus lebih aktif dan berani mengambil peluang terhadap pengembangan potensi kopi Bengkulu, khususnya melalui aktivitas paradiplomasi. Selain itu, aktor-aktor terkait harus lebih siap menghadapi risiko dan terbuka terhadap tantangan dalam pelaksanaan aktivitas paradiplomasi agar keuntungan yang dicapai oleh semua pihak dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16 (1), 31-50 <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>



- Bengkuluprov.go.id. (2022). *Pemprov Bengkulu dan Malaysia Jajaki Kerjasama Sektor Pariwisata*. <https://bengkuluprov.go.id/pemprov-bengkulu-dan-malaysia-jajaki-kerjasama-sektor-pariwisata/>
- Bisri. (2023). *Pengusaha Malaysia Jajaki Peluang Investasi di Kabupaten Rejang Lebong*. Radio Republik Indonesia. https://www.rri.go.id/bisnis/409038/pengusaha-malaysia-jajaki-peluang-investasi-di-kabupaten-rejang-lebong?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
- Carminanda. (2020). *Peringatan hari kopi internasional di Bengkulu batal, Ini alasannya*. Antara News.
- Christiyaningsih. (2022). *Kementan Berkomitmen Bantu Petani Kopi Rejang Lebong*. Republika.
- Diantoro, G. (2023). *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
- Hidayat, Y., & Haris, S. (2021). *Diplomasi Kopi Indonesia di Kazakhstan, Pintu Gerbang Menuju Pasar Asia Tengah. Akses Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika*. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL0FLU0VTL01hamFsYWglMjBBS1NFUyUyMDM5LnBkZg==>
- Jackson, T. (2018). *Paradiplomacy and political geography: The geopolitics of substate regional diplomacy*. *Geography Compass*, 12(2), 1–11. <https://doi.org/10.1111/gec3.12357>
- Kristianti, L. (2022). *Bencoolen Coffee buka lima gerai di Malaysia*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3224373/bencoolen-coffee-buka-lima-gerai-di-malaysia>
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (S. P. Permana & A. Sahide (eds.)). The Phinisi Press.
- Paquin, S. (2020). *Global Diplomacy*. *Global Diplomacy, January*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>
- Peraturan Bupati Rejang Lebong. (2020). *Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong*.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong. (2023). *Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong*.
- Peraturan Gubernur Bengkulu. (2020). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat. (2021). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Sabaruddin, S. S. (2017). *Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Wolff, S. (2007). *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*. *The Bologna Center Journal of International Affairs*, 10(1), 141–150.